

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor kebijakan renstra yang saling berintegrasi satu dengan lainnya. Oleh karena itu suatu Kewajiban Perangkat Daerah (PD) dalam mewujudkan Visi, Misi, Program dan kemudian ditindaklanjuti pada Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD).

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan Satuan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai perangkat otonomi daerah yang mempunyai visi dan misi sesuai kompetensi yang dimiliki serta koheren dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melaksanakan visi dan misi sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana kerja (Renja) yang dilaksanakan pada setiap tahunnya dalam rangka mengukur kinerja Organisasi dan sebagai tindak lanjut penjabaran dari Rencana Strategis Jangka Menengah (Lima Tahunan) yang capaian kinerjanya diukur setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja PD ditindak lanjuti dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya dan selanjutnya diproses dalam penyusunan RAPBD.

Target kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2023 ini, menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja unit satuan kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran kinerja/keberhasilan unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kinerja.

Sedangkan Rencana Kinerja pada Tahun 2022 bagi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan komitmen dan kontrak kerja yang harus dioptimalkan dalam proses pencapaian kinerjanya, sebagai bagian dari upaya pencapaian target kinerja, Rencana Strategis serta visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada Umumnya.

Dalam perkembangannya rencana kinerja yang telah disusun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

I.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) khususnya lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 24 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada setiap Perangkat Daerah (PD), dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I P E N D A H U L U A N

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2022 sebagai bahan pembandingan pada pelaksanaan Renja tahun 2021, dimana pada tahun 2021 pelaksanaan Renja PD capaian prosentasenya sekitar 94 persen dan berdasarkan realisasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencapaian yang cukup optimal atau serapan anggaran telah optimal. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seyogyanya ditempuh langkah-langkah strategis yakni dengan memberikan arahan dan petunjuk serta memotivasi SDM agar dapat memacu serapan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan.

Disamping itu adanya penyesuaian program berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat meningkatkan capaian prosentase pelaksanaan Renja PD pada tahun 2022. Sebagai bahan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI S.D. TRIWULAN II TAHUN 2022

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Program (Renstra SKPD) s.d. Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan s.d. triwulan II tahun 2022			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s.d. tahun berjalan (2022)	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian	57,20	57,0	57,10		0,0%	57	99,65%

	Kegiatan :Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	21,00	17,0	10,00		0,0%	17	81,0%
	SUB KEGIATAN Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	81	15,0	20	3	15,0%	15	18,5%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi berkualitas	8,20	0,0	5,00	0	0,0%	0	0,0%
	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilatih	1.1	0,0	1,00	0	0,0%	0	#VALUE!
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi	24	0,0	12	0	0,0%	0	0,0%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	75,2	2,0	2	0	0,0%	2	2,7%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan	58,00	7,0	7,00	0	0,0%	0	0,1%
	Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Data akurat UMKM yang terwujud	3,00	1,0	1,00	0	0,0%	0	0,3%

	Sub kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah wirausaha pemula yang tercipta	300,00	50,0	50,00	0	0,0%	1	0,2%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM	91,90	92,0	91,90	0	0,0%	92	100,1%
	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil	1,00	2,0	2,00	0	0,0%	2	200,0%
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil	9,00	7,0	5,00	1	20,0%	0	0,9%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	100,00	100,0	100,00	0	0,0%	33	33,0%
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	47,00	35,0	46,00	0	0,0%	35	74,5%
	Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	1.500,00	719,0	500,00	0	0,0%	719	47,9%
	Sub kegiatan: Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia	14,00	10,0	5,00	1	20,0%	11	78,6%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	68,80	0,0	-	0	0,0%	0	0,0%
	Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pemanfaatan informasi pasar kerja	30,00	0,0	-	0	0,0%	0	0,0%

	Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Banyaknya akses pada informasi pasar kerja online	1.000,00	0,0	-	0	0,0%	0	0,0%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan	91,2	91,0	91	0	0,0%	91	99,8%
	Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	91,20	20,0	22,00	0	0,0%	22	24,1%
	Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang didata	23,00	22,0	27,00	7	25,9%	29	126,1%
	Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga honorer Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan	100	100,0	100	0	0,0%	33	33,0%
	Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan	15.054,00	4.969,0	5.018,00	2509	50,0%	7478	49,7%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan permukiman yang dibina	2,30	2,0	2,10	0	0,0%	2	87,0%
	Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase transmigran yang dibina	75,30	76,0	-	0	#DIV/0!	76	100,9%

	Sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan	100,00	0,0	-	0	0,0%	0	0,0%
	Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	jumlah sarana hunian yang dipersiapkan	9,00	3,0	3,00	0	0,0%	3	33,3%
	Sub kegiatan: Pelatihan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang dilatih	100,00	0,0	-	0	0%	0	0,0%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri	24,70	23,0	24,20	0	0,0%	23	93,1%
	Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha	46,00	22,0	45,00	0	0,0%	22	47,8%
	Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah sarana yang dibantukan	6,00	1,0	2,00	1	50,0%	2	33,3%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100,0	100,00	50%	0,5%	33	33,0%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100,0	100,00	50%	0,5%	33	33,0%
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	9	3,0	3,00	2	66,7%	5	55,6%
	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat	3	1,0	1,00	1	100,0%	2	66,7%

	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100,0	100,00	50,00%	0,5%	33	33,0%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	42	14,0	14,00	7	50,0%	21	50,0%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan	2.160	715,0	720,00	354	49,2%	1069	49,5%
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud	3	1,0	1,00	0	0,0%	1	33,3%
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100,0	100,00	50%	0,5%	33	33,0%
	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan	70	0,0	-	0	0,0%	0	0,0%
	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya	105	35,0	35,00	14	40,0%	49	46,7%
	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya	105	35,0	35,00		0,0%	35	33,3%
	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100,0	100,00	50%	0,5%	33	33,0%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan	111	37,0	37,00		0,0%	37	33,3%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	14.256	0,0	-	0	0,0%	0	0,0%
	Sub kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.000	0,0	-	0	0,0%	0	0,0%

	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1.167	0,0	389,00	0	0,0%	0	0,0%
	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah hidangan tamu yang disediakan	645	215,0	215,00	44	20,5%	259	40,2%
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	462	105,0	154,00	27	17,5%	132	28,6%
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100,00	0%	0,0%	33	33,0%
	Sub Kegiatan: Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	6	0,0	-	0	0,0%	0	0,0%
	Sub Kegiatan: Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	20	0,0	10,00	0	0,0%	0	0,0%
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	14	3,0	4,00	0	0,0%	3	21,4%
	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	8	0,0	3,00	0	0,0%	0	0,0%
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100,00	50%	0,5%	33	33,0%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa listrik	36	12,0	12,00	6	50,0%	18	50,0%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36	12,0	12,00	6	50,0%	18	50,0%

	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100,0	100,00	30%	0,3%	33	33,0%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya	36	12,0	12,00	6	50,0%	18	50,0%
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50	33,0	33,00	5	15,2%	38	76,0%
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	0,0	1,00	0	0,0%	0	0,0%

Dari tabel TC 29 di atas terlihat bahwa sebagian target untuk tahun 2022 belum tercapai sesuai target. Hal ini disebabkan dana masih rendahnya penyerapan anggaran dan kehati-hatian aparat dalam melaksanakan kegiatan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara kelembagaan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah. Untuk mengukur Kinerja Pelayanan PD, maka dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode Analisa Lingkungan Strategis, Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diemban oleh lembaga Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan PD, memerlukan :

II.1.1. Lingkungan Strategis

Pengertian Lingkungan Strategis adalah faktor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Organisasi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Lingkungan Strategis dibagi dua yaitu Instrumental Input dan Environmental Input. Environmental Input berkaitan dengan kebijakan atau Political Will dan faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak dapat diubah melainkan disiasati apabila berbentuk ancaman. Demikian pula dengan lingkungan strategis dianalisis berdasarkan instrumental serta environmental input.

II.1.2. Analisa Lingkungan Internal

Lingkungan Internal merupakan Variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kinerja pada Unit Satuan

Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam batas-batas tertentu yang dapat dikendalikan dalam rangka mewujudkan tujuan/sasaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Selain itu, tersedianya Sumber Daya Manusia/Aparatur serta Sumber Daya Material berupa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi saat ini, meskipun masih jauh memadai, namun tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan dukungan dan motivasi kerja aparatur yang bertugas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

II.1.3. Analisa Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah salah satu Variabel yang turut mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja aparatur, akan tetapi pengelolaan atau pengendaliannya diluar kendali Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, jika faktor lingkungan eksternal ini mempunyai pengaruh atau berdampak negatif terhadap optimalisasi pencapaian kinerja aparatur maka harus dapat disiasati dalam rangka mendukung kelancaran dan meningkatkan kinerja unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan cara menyikapi desentralisasi kewenangan dalam hal pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal Pembangunan dan secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian				57	57,1	57,2		55	57,2	
2	Persentase koperasi yang diawasi				42	42,5	43		6,2	43	
3	Jumlah Koperasi yang diawasi				41	42	43		23	43	
4	Persentase koperasi berkualitas				0	8,1	8,2		0	8,2	
5	Persentase koperasi yang dilatih				0	10	11		0	11	
6	Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi				0	120	120		0	120	
7	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan				75	75,1	75,2		0	75,2	
8	Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan				14	20	24		0	24	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	10	<i>12</i>	<i>13</i>
9	Data akurat UMKM yang terwujud				1	1	1		0	1	

10	Jumlah wirausaha pemula yang tercipta				100	100	100		0	100	
11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM				92	91,9	91,8		93	91,8	
12	Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil				2	2	2		1	2	
13	Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil				5	5	5		2	5	
14	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan				100	100	100		33	100	
15	Persentase pelaksanaan pelatihan				40	46	47		33	47	
16	Jumlah pencari kerja yang dilatih				500	500	500		165	500	
17	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia				4	5	5		1	5	
18	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan				0	68,7	68,8		0	68,8	
19	Persentase pemanfaatan informasi pasar kerja				0	10	30		0	30	
20	Banyaknya akses pada informasi pasar kerja online				0	300	700		0	700	

21	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan				91	91,1	91,2		88	91,2	
22	Besaran pemeriksaan perusahaan				21	22	23		11	23	
23	Jumlah perusahaan yang didata				25	27	29		22	29	
24	Persentase tenaga honorer Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan				100	100	100		100	100	
25	Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan				4.969,00	5.018,00	5.067,00		4969	5.067,00	
26	Persentase Satuan permukiman yang dibina				2	2,1	2,3		0	2,3	
27	Persentase transmigran yang dibina				76,1	75,8	75,3		78	75,3	
28	jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan				0	50	50		0	50	
29	jumlah sarana hunian yang dipersiapkan				3	3	3		3	3	
30	Jumlah transmigran yang dilatih				0	50	50		0	50	

31	Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri				23,9	24,2	24,7		10	24,7	
32	persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha				43	45	46		22	46	
33	Jumlah sarana yang dibantukan				2	2	2		1	2	
34	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah				100	100	100		50%	100	
35	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100	100	100		50%	100	
36	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat				3	3	3		2	3	
37	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat				1	1	1		2	1	
38	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100	100	100		50,00%	100	
39	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14	14	14		8	14	
40	Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan				715	720	725		301	725	
41	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud				1	1	1		0	1	
42	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	100	100		50%	100	

43	Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan				35	0	35		0	35	
44	Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya				35	35	35		15	35	
45	Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya				35	35	35		15	35	
46	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100	100	100		50%	100	
47	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan				37	37	37		15	37	
48	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				4752	4752	4752		0	4752	
49	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				0	12500	12500		0	12500	
50	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				389	389	389		0	389	
51	Jumlah hidangan tamu yang disediakan				215	215	215		43	215	
52	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan				154	154	154		93	154	
53	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	100	100		50%	100	
54	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				0	3	3		0	3	

	yang diadakan										
55	Jumlah mebel yang diadakan				0	10	10		0	10	
56	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				3	4	4		3	4	
57	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				2	3	3		0	3	
58	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				100	100	100		50%	100	
59	Jumlah waktu penyediaan jasa listrik				12	12	12		6	12	
60	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12	12	12		6	12	
61	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	100	100		30%	100	
62	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya				12	12	12		6	12	
63	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				19	15	16		3	16	
64	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1	2	2		0	2	

II.3. Isu-Isu Penting Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk merumuskan isu-isu strategis dalam memproyeksikan kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Streng, Weakness, Opportunities dan Thtreats). Isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas Organisasi. Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan, agar memudahkan dalam mengorganisir isu, maka dilakukan identifikasi. Hasil identifikasi isu dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini ;

Matriks Internal Strategi Faktor Analisis Sistem

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
➤ Adanya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang ➤ Adanya komitmen dan motivasi kerja yang tinggi, di kalangan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.	➤ Jumlah Aparatur Pembina Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim. ➤ Sarana Prasarana Kerja dalam rangka pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, relatif masih kurang memadai.

Matriks Eksternal Strategi Faktor Analisis Sistem

Peluang (O)	Ancaman (T)
➤ Adanya Komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan stimulus bagi pelaku UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemic covid 19 dan perang Eropa Timur;. ➤ Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dalam menekan tingkat pengangguran ➤ Masih luasnya lahan untuk dijadikan daerah transmigrasi. ➤ Adanya struktur masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan serta budaya kerja yang ulet dan religius (Megetteppa na malempu).	➤ Ancaman krisis ekonomi global akibat pandemi covid 19 serta perang di Eropa Timur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat ➤ Terbatasnya daya serap Koperasi dan UMKM memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD sangat dibutuhkan dalam merumuskan perencanaan baik pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program dan kegiatan yang matang dan tentunya bermamfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Sistem Perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dikenal dengan adanya Perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) artinya memungkinkan menggali ide-ide dan gagasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan. Sistem perencanaan dengan metode tersebut dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Perencanaan metode dari atas kebawah (top down planning) untuk memungkinkan terjadinya perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan Keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan terjadinya proses tersebut, maka kita membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab Sidrap	Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian	57,2	24.745.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab Sidrap	Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian	57,2	24.745.000	
	Kegiatan :Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Sidrap	Persentase koperasi yang diawasi	21	24.745.000	Kegiatan :Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Sidrap	Persentase koperasi yang diawasi	21	24.745.000	
	SUB KEGIATAN Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	Jumlah Koperasi yang diawasi	20	24.745.000	SUB KEGIATAN Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	Jumlah Koperasi yang diawasi	20	24.745.000	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab Sidrap	Persentase koperasi berkualitas	8,2	12.605.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab Sidrap	Persentase koperasi berkualitas	8,2	12.605.000	
	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan	Kab Sidrap	Persentase koperasi yang dilatih	1,1	12.605.000	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan	Kab Sidrap	Persentase koperasi yang	1,1	12.605.000	12

	Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		dilatih			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab Sidrap	Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi	30	12.605.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab Sidrap	Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi	30	12.605.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab Sidrap	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	75,2	95.525.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab Sidrap	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	75,2	8.695..799.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab Sidrap	Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan	24,00	95.525.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab Sidrap	Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan	24,00	8.695..799.000	
	Pemberdayaan kelembagaan, potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab Sidrap	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	-	-	Pemberdayaan kelembagaan, potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab Sidrap	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	100	8.425.799.000	
	Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Sidrap	Data akurat UMKM yang terwujud	1,00	45.525.000	Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Sidrap	Data akurat UMKM yang terwujud	-	-	
	Sub kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan	Kab Sidrap	Jumlah wirausaha pemula yang tercipta	100,00	50.000.000	Sub kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan	Kab Sidrap	Jumlah wirausaha pemula yang tercipta	100,00	737.500.000	

	Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan					Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan					
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab Sidrap	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM	91,90	529.240.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab Sidrap	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM	91,90	4.475.000.000	
	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab Sidrap	Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil	2,00	529.240.000	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab Sidrap	Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil	2,00	4.475.000.000	
	Sub Kegiatan: Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab Sidrap	Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil	1,00	529.240.000	Sub Kegiatan: Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab Sidrap	Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil	70	737.500.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab Sidrap	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	100,00	725.180.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab Sidrap	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	100,00	1.253.595.000	
	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab Sidrap	Persentase pelaksanaan pelatihan	40,00	725.180.000	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab Sidrap	Persentase pelaksanaan pelatihan	40,00	1.253.595.000	
	Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Kab Sidrap	Jumlah pencari kerja yang dilatih	27	41.180.000	Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Kab Sidrap	Jumlah pencari kerja yang dilatih	143	215.249.000	

	Kompetensi					Kompetensi					
	Sub kegiatan: Pengadaan sarana pelatihan kerja kab/kota	Kab Sidrap	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia	5,00	684.000.000	Sub kegiatan: Pengadaan sarana pelatihan kerja kab/kota	Kab Sidrap	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia	5,00	50.000.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab Sidrap	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan	91,2	1.520.137.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab Sidrap	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan	91,2	1.294.453.000	
	Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	Besaran pemeriksaan perusahaan	23,00	25.502.000	Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	Besaran pemeriksaan perusahaan	23,00	15.000.000	12
	Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab Sidrap	Jumlah perusahaan yang didata	29,00	25.502.000	Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab Sidrap	Jumlah perusahaan yang didata	29,00	15.000.000	
	Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	Persentase tenaga honorer Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan	100	1.494.635.000	Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	Persentase tenaga honorer Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan	100	1.279.453.000	
	Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Kab Sidrap	Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan	5.067,00	1.494.635.000	Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Kab Sidrap	Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan	5.067,00	1.279.453.000	

	Kesejahteraan Pekerja					Pekerja					
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab Sidrap	Persentase Satuan permukiman yang dibina	2,30	1.091.845.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab Sidrap	Persentase Satuan permukiman yang dibina	2,30	381.895.000	
	Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	Persentase transmigran yang dibina	75,30	1.091.845.000	Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	Persentase transmigran yang dibina	75,30	381.895.000	
	Sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan	50,00	50.000.000	Sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Sidrap	jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan	50,00	181.895.000	
	Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kab Sidrap	jumlah sarana hunian yang dipersiapkan	3,00	991.845.000	Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kab Sidrap	jumlah sarana hunian yang dipersiapkan	3,00	200.000.000	
	Sub kegiatan: Pelatihan Transmigrasi	Kab Sidrap	Jumlah transmigran yag dilatih	0	0	Sub kegiatan: Pelatihan Transmigrasi	Kab Sidrap	Jumlah transmigran yag dilatih	0	0	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab Sidrap	Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri	24,70	51.510.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab Sidrap	Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri	24,70	12.268.000	

	Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kab Sidrap	persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha	46,00	51.510.000	Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kab Sidrap	persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha	46,00	12.268.000	
	Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab Sidrap	Jumlah sarana yang dibantukan	2,00	51.510.000	Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab Sidrap	Jumlah sarana yang dibantukan	2,00	12.268.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Sidrap	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.951.119.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Sidrap	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.774.758.000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	26.240.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	3	16.140.000	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	3	9.000.000	
	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat	1	10.100.000	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat	3	7.000.000	
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.191.357.000	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.119.205.00	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Sidrap	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14,00	3.168.259.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Sidrap	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14,00	3.102.205.000	

	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Sidrap	Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan	720	14.928.000	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Sidrap	Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan	725	10.000.000	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Sidrap	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud	1	8.170.000	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Sidrap	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud	1	7.000.000	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.194.000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	7.000.000	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Sidrap	Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan	-	-	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Sidrap	Jumlah pakaian dinas dan atribut perlengkapannya yang diadakan	-	-	
	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Sidrap	Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya	35	10.100.000	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab Sidrap	Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya	35	7.000.000	
	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Sidrap	Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya	35	10.094.000	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Sidrap	Jumlah ASN yang dimonev dan dinilai kinerjanya	0	0	
	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	321.764.000	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	213.893.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Sidrap	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan	37	1.500.000	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Sidrap	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan	37	1.500.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Sidrap	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	389	3.514.000	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Sidrap	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	389	1.800.000	

	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab Sidrap	Jumlah hidangan tamu yang disediakan	215	7.700.000	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab Sidrap	Jumlah hidangan tamu yang disediakan	215	8.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Sidrap dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	154	198.737.000	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Sidrap dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	154	202.593.000	
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	207.513.000	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	36.000.000	
	Sub Kegiatan: Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kab Sidrap	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	3	90.000.000	Sub Kegiatan: Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kab Sidrap	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	3	0	
	Sub Kegiatan: Pengadaan mebel	Kab Sidrap	Jumlah mebel yang diadakan	10	50.000.000	Sub Kegiatan: Pengadaan mebel	Kab Sidrap	Jumlah mebel yang diadakan	10	0	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4	85.000.000	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4	19.013.000	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Sidrap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3	16.818.000	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Sidrap	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3	16.987.000	

	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab Sidrap	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	182.283.000	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab Sidrap	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	285.600.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Sidrap	Jumlah waktu penyediaan jasa listrik	12,00	48.000.000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Sidrap	Jumlah waktu penyediaan jasa listrik	12,00	81.600.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Sidrap	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12,00	134.283.000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Sidrap	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12,00	204.000.000	
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	115.459.000	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sidrap	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100.060.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Sidrap	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya	12,00	81.970.000	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Sidrap	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya	12,00	66.170.000	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19,00	19.000.000	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19,00	23.690.000	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1,00	10.000.000	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1,00	10.200.000	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dikenal dua arah, yaitu Top Down Planning dan Bottom Up Planning, kedua Sistem tersebut sering digunakan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi perpaduan antara perumusan Kebijakan Pemerintah dan keinginan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan untuk saling bersinergi satu dengan lainnya.

Dalam pelaksanaannya dilakukan setiap tahun sebagai penjabaran Pembangunan Lima Tahunan dan mulai dilakukan pada tingkat Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan) yang melibatkan Stakeholders, kemudian ditindaklanjuti pada tingkat kecamatan. Musrenbang tersebut kemudian dirumuskan pada tingkat Kabupaten sebagai Program Unit Kerja SKPD Tahunan, Pelaksanaan Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan dimaksudkan menampung aspirasi masyarakat sebagai pencerminan azas keadilan dan pemerataan, agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan disegala aspek secara berkelanjutan (sustainable).

Usulan Program masyarakat Desa/Kelurahan dapat kita tampung pada tingkat SKPD. Tidak semua usulan program masyarakat dapat diterima oleh karena tidak sejalan apa yang kita programkan dan terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan keterbatasan dana tersebut.

Tabel II. 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN
1	2	4	5	6	7	8
I.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja					
	Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					
1	Pelatihan Tata Rias	Mojong, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah pencari kerja yang dilatih	16 orang	25.000.000	Pokir agt DPRD
2	Kursus menjahit	PASSENO, Kab. Sidenreng Rappang	sda	10 orang	15.000.000	sda
	Program Pengembangan UMKM					
	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					
	Bantuan Mesin jahit	Desa Kalosi, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah sarana yang diserahkan	1 Paket	20.000.000	Pokir agt DPRD

	Bantuan Pengadaan oven	Desa Kalosi, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Paket	19.910.000	sda
	Bantuan Pakaian Adat	DUA PITUE, PITU RIAWA, PITU RIASE, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Paket	50.000.000	sda
	Bantuan ALAT DAN PERLENGKAPAN PEMBUATAN ABON	BILA, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Paket	100.595.000	sda
	bantuan gurinda	Desa Lise	sda	1 Paket	200.000.000	Pokir agt DPRD
	Bantuan Tenda kerucut	Toddang Pulu, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang,	sda	1 Paket	40.000.000	Sda
	Bantuan alat Pertukangan Kayu	Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 Paket	56.700.000	Sda
	Bantuan Pertukangan Aluminium	Kel Wala, Maritengngae,	sda	1 paket	58.217.000	Sda
	Bantuan Pengadaan Tenda Terowongan	Lotang Kaluku	sda	1 paket	50.000.000	Sda
	Pengadaan Tenda	Alessalewo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	50.000.000	Sda
	Pengadaan Gurinda (Makita mesin serut 1901B)	Massepe, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	315.000.000	Sda
	Pengadaan Gurinda (Makita mesin serut 1901B)	Pajalele, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	315.000.000	Sda
	PENGADAAN PERALATAN TATA BOGA UNTUK KELOMPOK PENCARI KERJA	PANGKAJENE, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	20.000.000	Sda
	PENGADAAN MESIN JAHIT DI DESA PASSENO (Typical GC-6-28-1)	PASSENO, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	36.865.000	Sda
	pengadaan mesin jahit	Desa salobukkabg, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	20.000.000	Sda

	Pengadaan mesin jahit	Desa botto, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	20.000.000	Sda
	pengadaan perlengkapan alat salon kecantikan	Desa Botto, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	20.000.000	Sda
	Pengadaan Alat Tata Boga (Turbo mixer grandephilips EHM9595)	Lise, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	60.720.000	Sda
	Bantuan Mesin Jahit (Typical GC-6-28-1)	Alessalewo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	259.325.000	Sda
	Pengadaan Alat Tata Boga (Turbo mixer grandephilips EHM9595)	Toddang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	60.720.000	Sda
	Pengadaan Mesin Jahit (Typical GC-6-28-1)	Toddang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	8.096.000	Sda
	Pengadaan Alat Tata Boga (Turbo mixer grandephilips EHM9595)	Lotang Kaluku, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	10.120.000	Sda
	Pengadaan Alat Pembuatan Kue 4 Kelompok (Turbo mixer grandephilips EHM9595)	Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	8.096.000	Sda
	Pengadaan Mesin Jahit (Typical GC-6-28-1)	Taluma"e, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	60.720.000	Sda
	Bantuan Kompor Gas untuk Masyarakat Wala dan Lekessi (Kompor gas komersial Butterfly D-21A)	Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	sda	1 paket	101.200.000	Sda
	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM					
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					

	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirasusaha Pemula	desa bulo, Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	33 orang	50.000.000	Pokir agt DPRD
	Pelatihan kewirausahaan UMKM	desa bulo, Kab. Sidenreng Rappang	sda	50 orang	75.000.000	Sda
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirasusaha Pemula	kecamatan tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	sda	83 orang	125.000.000	Sda
	Pelatihan peningkatan kapasitas Wirausahaan masyarakat	panca rijang, kulo, baranti, Kab. Sidenreng Rappang	sda	50 orang	75.000.000	Sda
	Sosialisasi kewirausahaan kepemudaan	Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	sda	16 orang	25.000.000	Sda
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirasusaha Pemula	BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	sda	20 orang	30.000.000	Sda

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Lima Tahun (Jangka Menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan, yaitu APBN Awal dan APBN Perubahan. Dalam setiap penetapan APBN telah tertuang didalamnya berbagai Program lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia telah memproyeksikan program serta mengakomodir usulan-usulan dari Daerah kemudian dirumuskan menjadi Program Nasional melalui Rakornas yang dilaksanakan setiap tahun.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 adalah “Peningkatan potensi dan daya saing daerah untuk mendorong kebangkitan ekonomi”, dengan sasaran diantaranya Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2023 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumberdaya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi system ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Tujuan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Bupati dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur sebagai wujud pelaksanaan perencanaan, serta

menitikberatkan pada pemulihan ekonomi pada pelaku usaha mikro kecil menengah, koperasi; sehingga dapat mencegah peningkatan pengangguran dan memperluas area transmigrasi demi terwujudnya kesejahteraan yang merata.

a. Tujuan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
- 2) Memperluas kesempatan kerja yang layak
- 3) Mengembangkan dan memajukan kawasan transmigrasi

b. Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM
- 2) Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung investasi daerah
- 3) Meningkatnya Pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi.

c. Indikator Sasaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- 1). Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM
- 2). Tingkat penyerapan tenaga kerja.
- 3). Persentase kawasan transmigrasi yang lepas binaan.

III.3. Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023 memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - d. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - 1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- C. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - 1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- D. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - a. Sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - b. Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - c. Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
- E. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
- F. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - a. Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
- G. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - 1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mematuhi prinsip perkoperasian
2	Kegiatan :Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi
3	SUB KEGIATAN Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi berkualitas
5	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilatih
6	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan
8	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang meningkat vol usahanya setelah diberdayakan
9	Sub kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Data akurat UMKM yang terwujud
10	Sub kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
11	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha pemula yang tercipta
12	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap total UMKM
13	Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil
14	Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil

15	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan
16	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan
17	Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih
18	Sub kegiatan: Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia
19	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan
20	Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan
21	Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang didata
22	Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga honorer Pemda yang dilindungi asuransi ketenagakerjaan
23	Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan
24	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan permukiman yang dibina
25	Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase transmigran yang dibina
26	Sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan
27	Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	jumlah sarana hunian yang dipersiapkan
28	Sub kegiatan: Pelatihan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang dilatih
29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang lepas bina/mandiri
30	Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	persentase transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan usaha
31	Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah sarana yang dibantu
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah
33	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

34	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat
35	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat
36	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
37	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
38	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan
39	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud
41	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
43	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya
44	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah
45	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan
46	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
47	Sub kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
48	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan
49	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah hidangan tamu yang disediakan
50	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
51	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
52	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan
53	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
54	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
55	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa listrik
56	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor
57	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
58	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya

59	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
60	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu disusun rencana kerja yang memuat sejumlah program dan kegiatan. Rencana kerja ini tidak terlepas dari rencana strategis yang telah ditetapkan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dalam rencana strategis telah dipetakan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai nomenklatur dalam permendagri dimaksud, namun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum kami temukan keselarasannya dan telah kami usulkan untuk dibuatkan penetapan terhadap program dan kegiatan tersebut.

Untuk tahun 2023 ditetapkan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp.15.159.272.000. Program, kegiatan berikut pendanaannya kami sajikan dalam Tabel C29 berikut.

Tabel T-C.29
RANCANGAN RENJA 2022
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.519.702.000			2.245.317.000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				225.249.000			725.180.000	
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				225.249.000			725.180.000	
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih		500 orang	215.249.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	41.180.000
2	07	03	2,01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pelatihan kerja yang tersedia		5 paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	684.000.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				1.294.453.000			1.520.137.000	
2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000			25.502.000	
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang didata		29 perusaha	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		91.20 Persen	25.502.000

2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				1.279.453.000			1.494.635.000
2	07	05	2,02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga honorer pemda yang dijamin asuransi ketenagakerjaan		5067 paket	1.279.453.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	91.20 Persen	1.494.635.000
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				13.245.407.000			6.481.937.123
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.774.758.000			5.819.822.123
2	17	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.000.000			26.500.000
2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat		3 dokumen	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	16.300.000
2	17	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat		1 paket	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	10.200.000
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.119.205.000			4.867.999.123
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		14 bulan	3.102.205.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.844.669.123
2	17	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen/bahan pelaksanaan verifikasi yang diselesaikan		725 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	15.077.000

2	17	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terwujud		1 paket	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	8.253.000
2	17	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.000.000			30.490.000
2	17	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang didata dan diolah administrasinya		35 orang	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	10.200.000
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				210.893.000			374.155.000
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan		37 paket	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	1.461.000
2	17	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		389 paket	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	3.550.000
2	17	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah hidangan tamu yang disediakan		215 paket	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	5.075.000
2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		154 paket	202.593.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	250.000.000
2	17	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36.000.000			208.189.000

2	17	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		4 paket	19.013.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	51.202.000
2	17	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		3 paket	16.987.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	16.987.000
2	17	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				285.600.000			206.982.000
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa listrik		12 bulan	81.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	70.000.000
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	204.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	136.982.000
2	17	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.060.000			105.507.000
2	17	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	66.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	83.617.000
2	17	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		16 unit	23.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	11.690.000

2	17	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 paket	10.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	10.200.000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				24.745.000			24.745.000
2	17	03	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				24.745.000			24.745.000
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi		20 koperasi	24.745.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	57,20 Persen	24.745.000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				12.605.000			12.605.000
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				12.605.000			12.605.000
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah anggota/ pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan/ sosialisasi		12 paket	12.605.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8,20 Persen	12.605.000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				8.695.799.000			95.525.000
2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				8.695.799.000			95.525.000
2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		100 Unit Usaha	8.425.799.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	75,20 Persen	8.500.000.000
2	17	07	2,01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha pemula yang tercipta		100 target	270.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75,20 Persen	50.000.000

2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				737.500.000			529.240.000
2	17	08	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				737.500.000			529.240.000
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil		2 paket	737.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	91,80 Persen	529.240.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				394.163.000			1.143.355.000
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				381.895.000			1.091.845.000
3	32	03	2,01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				381.895.000			1.091.845.000
3	32	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah transmigran yang mendapat fasilitas bantuan		50 paket	181.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2,30 Persen	50.000.000
3	32	03	2,01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	jumlah sarana hunian yang dipersiapkan		3 paket	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2,30 Persen	991.845.000
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				12.268.000			51.510.000
3	32	04	2,01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				12.268.000			51.510.000
3	32	04	2,01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah sarana yang dibantukan		2 paket	12.268.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24,70 Persen	51.510.000
TOTAL									15.159.272.000			9.870.609.123

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Referensi (Undang-Undang/Peraturan), Renstra, dan keterpaduan Top Down Planning (Konsultatif) dan Bottom Up Planning (Definitif) melalui Musrenbang dan Kebutuhan Organisasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang serta menselaraskan dan mensinergikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu mendapat perhatian khusus jika sekiranya ketersediaan anggaran cukup demi untuk pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2023.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 27 Juli 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG,



Handwritten signature of Andi Safari Renata

ANDI SAFARI RENATA, S.I.P.M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730306 199202 1 002

